



Seorang guru menunjukkan koleksi buku bacaan di pojok baca sekolah di Kalimantan Utara.

Inisiatif pojok baca ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menumbuhkan budaya baca sejak dulu (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Nunukan

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Nunukan: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Nunukan belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Di Kabupaten Nunukan, kualitas lingkungan belajar terdampak oleh masih terjadinya perundungan dan kekerasan di sekolah, stereotip gender terhadap peran murid dan guru, serta praktik pendidikan yang belum optimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas. Situasi ini diperparah oleh langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang masih terbatas dan belum disesuaikan dengan konteks lokal.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan efektif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 45,47; perempuan 48,66

Numerasi : Laki-laki 34,59; perempuan 37,47

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar 1-3 poin dari nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Nunukan, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Nunukan pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 3-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Sejumlah kasus kekerasan dilakukan oleh guru maupun murid. Pemangku kepentingan di sekolah belum paham sepenuhnya tentang definisi kekerasan dan cakupan tindakan disiplin. Akibatnya, murid juga belum bisa membedakan tindakan yang benar dan salah. Kemudian, sekolah enggan melaporkan kasus kekerasan karena risiko rusaknya nama baik dan reputasi.

Selain itu, persepsi terhadap perilaku, peran, dan tanggung jawab murid dan guru masih terbatas pada norma dan stereotip gender tradisional. Misalnya, laki-laki diprioritaskan melanjutkan pendidikan tinggi dan menjadi kepala sekolah daripada perempuan, yang didorong untuk tinggal di rumah dan fokus pada pekerjaan domestik.



Inklusi disabilitas dan sosial

Sebelum Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 berlaku, terdapat 1.162 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), dengan sekitar 31% tidak sekolah dan 69% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (55%), sekolah inklusi (6%), atau sekolah luar biasa/SLB (8%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, murid penyandang disabilitas masih sering ditolak ketika mendaftar ke sekolah. Akses ke dan di sekolah tidak memadai serta guru dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun menguat di masyarakat.

Di sisi lain, masih banyak pula murid yang termarginalkan. Contohnya, murid yang berasal dari keluarga miskin, murid dengan orang tua merantau (pekerja migran), murid di daerah terpencil, serta murid yang terlibat dalam perkawinan anak dan sebagai pekerja anak.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Nunukan mencapai 166,33 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Kalimantan Utara (148,16) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Namun, kabupaten ini tidak memiliki bencana dengan risiko tinggi.

Sekolah dan masyarakat telah melakukan langkah mitigasi dan adaptasi secara mandiri. Misalnya, menanam pohon, mengubah daun kering menjadi pupuk kompos, dan mendaur ulang sampah plastik. Namun, masih ada perilaku dan kebiasaan masyarakat yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai dan membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah pun belum menerapkan langkah yang lebih sistematis dan jangka panjang.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Gangguan belajar akibat perubahan iklim

Bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir, membuat guru perempuan lebih sulit mengunjungi rumah murid, menghambat akses belajar—terlebih bagi anak penyandang disabilitas—and mengganggu perekonomian yang memperparah kemiskinan.



Kemiskinan

Kemiskinan menyebabkan anak tidak hadir atau putus sekolah dan memaksa mereka bekerja membantu orang tua di sawah atau melaut. Misalnya, anak perempuan membantu *mabettang*, yaitu mengikat bibit rumput laut ke bentangan tali sebelum ditanam di laut.



Norma dan praktik budaya

Norma budaya dan tradisi adat memengaruhi pandangan orang tua untuk tidak memprioritaskan pendidikan anak, menjodohkan anak dalam perkawinan usia dini, atau justru menikahkan anak perempuan dengan pelaku kekerasan seksual setelah kekerasan terjadi.



Gender dan disabilitas

Anak perempuan penyandang disabilitas punya risiko terbesar atau paling rentan terhadap kekerasan, pengucilan, dan dampak perubahan iklim.



Seorang guru sedang mendampingi muridnya memahami konteks bencana alam melalui buku pelajaran (©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Nunukan untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan agar semakin responsif dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten agar dapat menjadi garda terdepan perlindungan anak, termasuk pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak di sekolah.
2. Memperkuat pelaksanaan program-program pengembangan kapasitas kepala sekolah dan guru, terutama mengenai pengelolaan perilaku dan penerapan disiplin positif di sekolah.
3. Menyusun SOP dan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mendukung pengembangan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pendidikan inklusif. Langkah ini dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan serta penyediaan akses dan fasilitas belajar yang layak bagi murid penyandang disabilitas.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard Profil Belajar Siswa (PBS)*, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan, pemberian dukungan, dan penguatan kapasitas guru untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.
5. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid penyandang disabilitas.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Ujian Kesetaraan, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, dan Bantuan Operasional Sekolah) secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan di daerah terpencil. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.
3. Mengupayakan penyediaan fasilitas belajar di masing-masing komunitas, seperti pusat pembelajaran, listrik dan jaringan internet, serta buku dan bahan belajar, sehingga anak bisa menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mendukung pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merancang skema evakuasi bencana di sekolah. Dengan begitu, murid dan guru memiliki kesiapsiagaan, mampu merespons bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital, salah satunya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku mereka.